



**ANALISIS KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT**

*ANALYSIS OF THE GOVERNOR'S AUTHORITY IN FORMING DISTRICT/CITY REGIONAL  
REGULATIONS IN WEST PAPUA PROVINCE*

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**Oleh KAHAR  
THALIB NIM.  
2022025015069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS**

**ANALISIS KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT**

*ANALYSIS OF THE GOVERNOR'S AUTHORITY IN THE FORMATION OF DISTRICT/CITY  
REGIONAL REGULATIONS IN WEST PAPUA PROVINCE*

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal, 8 Juli 2024

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing I**



**( Dr. LILY BAUW, S.H, M.H )**  
**NIP. 19660515 199303 2 002**

**Dosen Pembimbing II**



**(Dr. YUSTUS PONDAYAR, S.H, M.H)**  
**NIP. 19730619 200312 1 001**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19660302 199303 1 002**

**PELAKSANAAN UJIAN**

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 9 Juli 2024

**TIM PENGUJI**

Dr. LILY BAUW, S.H, M.H  
NIP. 19660515 199303 2 002

Ketua

  
(.....)


Dr. YUSTUS PONDAYAR, S.H, M.H  
NIP. 19730619 200312 1 001

Sekretaris

  
(.....)

Dr. WILLIAM REBA, S.H, M.H  
NIP. 19620909 199103 1 001

Anggota

  
(.....)

Dr. MARUDUT HASUGIAN, S.H, M.H  
NIP. 19641211 199303 1 003

Anggota

  
(.....)

Dr. YUSAK E.REBA, S.H,M.H  
NIP. 19750210 200112 1 003

Anggota

  
(.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KAHAR THALIB

NIM. : 2022025015069

Judul : Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Fakfak, 9 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,



**KAHAR THALIB**

**NIM. 2022025015069**

## ABSTRAK

**Kahar Thalib**, “Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat”, dibimbing oleh **Lily Bauw** sebagai Pembimbing I dan **Yustus Pondayar** sebagai Pembimbing II.

**Metode Penelitian** menggunakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dipilih **dua permasalahan**: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui Biro Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat?; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. **Tujuan Penelitian** untuk 1). mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui biro hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat; dan 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Efektifitas Hukum.

**Hasil Penelitian** yang penulis peroleh adalah bahwa pelaksanaan kewenangan Gubernur Papua Barat melalui Biro Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik kewenangan Fasilitasi, kewenangan evaluasi, kewenangan klarifikasi dan kewenangan verifikasi. namun kewenangan Verifikasi rancangan peraturan daerah sebelum pemberian noreg Perda tidak dilakukan oleh Biro Hukum dan tidak pernah ada Berita Acara Hasil Verifikasi. Serta ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yaitu faktor aparatur/SDM, faktor belum adanya pelatihan-pelatihan Legal Drafting, faktor Prasarana dan sarana, faktor hukum/regulasi dan faktor anggaran.

Kata Kunci: Kewenangan, Biro Hukum, Peraturan Daerah

## ABSTRACT

**Kahar Thalib**, "Analysis of the Governor's Authority in Forming District/City Regional Regulations in West Papua Province", supervised by **Lily Bauw** as Supervisor I and **Yustus Pondayar** as Supervisor II.

**The research method** uses normative juridical research, namely research used to examine legal rules and principles using a statutory approach and conceptual approach, prioritizing secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next two problems were chosen: 1). How is the implementation of the Governor's authority through the Legal Bureau in carrying out its supervisory function over the process of forming Regency/City Regional Regulations in West Papua Province?; 2). Factors influencing the implementation of the Governor's authority in forming Regency/City Regional Regulations in West Papua Province. Research Objectives for 1). reviewing and analyzing the implementation of the Governor's authority through legal bureaus in carrying out supervisory functions over the process of forming Regency/City regional regulations in West Papua Province; and 2). To find out the factors that influence the implementation of the Governor's authority in forming district/city regional regulations.

The legal theories used in this research are the Theory of the Rule of Law, the Theory of Authority and the Theory of Legal Effectiveness.

**The results of the research** obtained by the author are that the implementation of the authority of the Governor of West Papua through the Legal Bureau in carrying out its supervisory function over the process of forming Regency/City Regional Regulations is generally in accordance with statutory regulations, including Facilitation authority, evaluation authority, clarification authority and verification authority. However, the legal bureau does not have the authority to verify draft regional regulations before granting noreg regulations and there has never been an official report on the results of the verification. And there are 5 (five) factors that influence the implementation of the Governor's authority in forming Regency/City Regional Regulations in West Papua Province, namely the apparatus/HR factor, the absence of Legal Drafting training, the infrastructure and facilities factor, the legal/regulatory factor and the budget factor.

Keywords: Authority, Legal Bureau, Regional Regulations

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“ IKATLAH ILMU DENGAN MENULISNYA”

Kupersembahkan kepada:

Dengan penuh kerendahan hati ku persembahkan Karya Tulis ini kepada:

1. Allah SWT, karena atas ijin dan perkenan-Nya, maka saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kedua Orang Tuaku terkasih dan tercinta.
3. Istri tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan dan menemani serta mendukung terselesainya karya tulis ini.
4. Anak-anak tercinta sebagai penyemangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Saudara-saudara kandungku.
6. Teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum kelas Fakfak.
7. Rekan-rekan kerja pada bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak yang selalu memberi dukungan moril dan materiil.
8. Almamater Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Cendrawasih. Judul tesis ini adalah "Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat".

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, selaku Bupati Fakfak yang telah memberikan kesempatan dan Ijin untuk mengikuti Pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Kelas Fakfak-Jayapura.
2. Bapak Dr. Oscar O. Wambrau, SE, M.Sc.Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura.
3. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H, M.A, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.
4. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayapura Papua.
5. Ibu Lily Bauw, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak Yustus Pondayar, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
7. Kedua Orang Tua, Almarhum H. Thalib Rauf dan ibunda tercinta dan terkasih Rosmini Landau, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan untukku. Semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang kelak akan membanggakan dan membahagiakanmu.

8. Orang-orang tersayangku, Istriku Ummu Rahmah, yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan kapanpun, dimanapun, apapun selalu berusaha membantu dan menjadi pendamping yang terbaik, serta kedua putriku Asyifa Raihanah Kahar dan Athifah Fazila Kahar, kalian adalah sumber inspirasiku, rasa sayang dan cintaku hanya untuk kalian.
9. Saudara-saudara kandungku, Adam Thalib, Aisyah Thalib, Faisal Thalib dan Zulfikar Ikram Thalib, terima kasih atas dukungan kalian semua.
10. Teman-teman seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Kelas Fakfak-Jayapura.
11. Rekan-rekan kerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Fakfak, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Pengertian tentang Pemerintahan Daerah.....	14
2. Tujuan Pemerintahan Daerah .....	16
3. Tugas Pemerintah Daerah.....	16
4. Pembentukan Produk Hukum Daerah .....	18
5. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah.....	20
6. Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Peraturan Daerah .....	21

7. Tahapan Verifikasi Hasil Fasilitasi Sebelum Pemberian Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>26</b>
A. Landasan Teoritis .....	26
1. Teori Negara Hukum.....	27
2. Teori Teori Kewenangan.....	31
3. Teori Efektifitas Hukum .....	37
B. Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Pendekatan .....	49
C. Sumber Bahan Hukum .....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Melalui Biro Hukum Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat .....	63
1. Kedudukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.....	63
2. Kewenangan Fasilitasi Gubernur Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	68
3. Kewenangan Evaluasi Gubernur Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	79
4. Kewenangan Verifikasi Gubernur Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	87

5. Kewenangan Klarifikasi Gubernur Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	93
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat .....	97
1. Aparatur/Sumber Daya Manusia.....	97
2. Pelatihan-pelatihan Legal Drafting.....	98
3. Prasarana dan Sarana.....	100
4. Hukum/ Regulasi.....	102
5. Anggaran .....	106
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111